

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA  
ALOKASI KHUSUS, DAN LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN**

**(Studi kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020)**



Oleh :

Nama : Ikhsan Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 18313370

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN**

(Studi kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020)

## **SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Ikhsan Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 18313370

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain seperti dalam buku pedoman penyusunan Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman /sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Penulis,



Ikhsan Hidayat

## PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI  
KHUSUS, DAN LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO TERHADAP KEMISKINAN

(Studi kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020)

Nama : Ikhsan Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 18313370

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta,

Telah disetujui oleh,



Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D.

Dosen Pembimbing

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, PENDAPATAN  
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN LAJU  
PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP  
KEMISKINAN (STUDI KASUS: KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2010-2020)**

Disusun Oleh : **IKHSAN HIDAYAT**

Nomor Mahasiswa : **18313370**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan  
**LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 15 Juli 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Akhsyim Afandi, Drs., MA. Ec., Ph.D.

Penguji : Nur Feriyanto, Prof. Dr. Drs., M.Si

  
.....  


Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika Universitas Islam  
Indonesia



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFA.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT atas lindungan dan karunia-Nya yang memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yang memberikan semangat, nasihat, dan doa-doa. Untuk adikku yang menjadi penyemangat, serta sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberi motivasi dan menemani senang maupun susah.

Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.



## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. (Ali 'Imran ayat 139)





## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji bagi Allah SWT atas seluruh nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020” tepat pada waktunya. Shalawat serta Salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi sebagai syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna, karenanya penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Tidak lupa atas dukungan, motivasi, dan doa-doa dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia, dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua tercinta Bapak Sutoyo dan Ibu Yulianti yang selalu mengingatkan untuk tidak bermalas-malasan dan memberikan dukungan, motivasi, serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun studi ini.
3. Untuk adik penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., C.FrA. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA yang sebagai Ketua Jurusan Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi waktu, saran dan arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada karyawan dan staff FBE UII yang sudah membantu penulis selama kuliah di FBE UII.
8. Sahabat dan teman-teman Muhammad Sofyan, Devandra Srivintara, Salsabila Tiaratama, Fajri Andika, Ryan Putera, Ikrar, Agum, Anggit, Rinaldy, Gufron Wahyu, Dimas, Ghani, Dafa, Bagus serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberi semangat, motivasi, dan bantuan dalam menempuh studi maupun saat mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman satu bimbingan Fajri Andika, Cemara, Justicia, Fina, dan yang lainnya, terima kasih telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian kata pengantar yang dapat disampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 13 Juni 2022

Penulis,



Ikhsan Hidayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Kemiskinan.....	11
2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka .....	12

2.2.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan .....	13
2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	14
2.2.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan .....	14
2.2.6 Dana Alokasi Umum (DAU).....	15
2.2.7 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan.....	16
2.2.8 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	16
2.2.9 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan.....	17
2.2.10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto .....	17
2.2.11 Pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan .....	18
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	18
2.4 Hipotesis Penelitian.....	18
BAB III.....	20
METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	20
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	20
3.2.1 Variabel Dependen.....	20
3.2.2 Variabel Independen .....	20
3.3 Metode Analisis.....	21
3.4 Metode Analisis Penelitian .....	22
3.5 Estimasi Model Regresi Data Panel.....	22
3.5.1 <i>Common Effect Model</i> (CEM) .....	23
3.5.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	23
3.5.3 <i>Random Effect Model</i> (REM) .....	23
3.6 Penentu Model Estimasi.....	23
3.6.1 Uji Chow ( <i>Chow Test</i> ).....	23

3.6.2 Uji Hausman ( <i>Hausman Test</i> ).....	24
3.7 Uji Statistik.....	24
3.7.1 Uji Koefisien Determinasi ( <b>R<sup>2</sup></b> ) .....	24
3.7.2 Uji Simultan (Uji F) .....	24
3.7.3 Uji Parsial (Uji T) .....	25
BAB IV .....	26
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	26
4.2 Hasil dan Analisis.....	27
4.2.1 Common Effect Model (CEM) .....	27
4.2.2 Fixed Effect Model (FEM) .....	28
4.2.3 Random Effect Model (REM).....	29
4.3 Hasil Pengujian Regresi Model Data Panel.....	30
4.3.1 Uji Chow ( <i>Chow Test</i> ).....	30
4.3.2 Uji Hausman ( <i>Hausman Test</i> ).....	31
4.4 Hasil Pengujian Statistik.....	32
BAB V.....	40
KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	43
LAMPIRAN.....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah (2010 - 2020).....	2
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif.....	26
Tabel 4. 2 Hasil Uji Common Effect Model.....	27
Tabel 4. 3 Hasil Uji Fixed Effect Model.....	28
Tabel 4. 4 Hasil Uji Random Effect Model.....	29
Tabel 4. 5 Hasil Regresi Uji Chow dengan Redundant Test.....	30
Tabel 4. 6 Hasil Regresi Uji Hausman.....	31
Tabel 4. 7 Hasil Regresi Fixed Effect.....	32



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Koefisien Intersep Cross Effect .....	35
Grafik 4. 2 Koefisien intersep Period Effect .....	36
Grafik 5. 1 Laju Pertumbuhan PDRB dan Tingkat Pengangguran .....	39



## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan *model fixed effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata kunci:** Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari banyak pulau serta terdapat berbagai suku dan agama yang beragam. Karena keberagaman ini yang menyebabkan adanya perbedaan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, hal tersebut juga memicu adanya ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan pembangunan. Secara umum, kemiskinan dapat diukur melalui dimensi income dan dimensi non-faktor keuangan. Dimensi income ini pengukurannya tidak hanya diukur dari pendapatan rendah yang didapat oleh masyarakat karena hanya bersifat sementara, tetapi juga diukur dengan kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki masyarakat. Sedangkan dimensi non-faktor keuangan terdapat adanya keputusan yang menimpa masyarakat berpenghasilan rendah.

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai berbagai masalah perekonomian. Salah satu permasalahannya adalah kemiskinan. Pada tahun 1970-an Indonesia sudah mulai mengatasi masalah kemiskinan tersebut dengan membuat program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi pada tahun 1980-an program tersebut mencapai titik jenuh yang berarti program yang diadakan oleh pemerintah Indonesia sudah tidak berkembang, sehingga pada tahun 1990-an jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali meningkat yang disebabkan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor dan ketimpangan antar wilayah. Walaupun upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan belum sesuai dengan ekspektasi, pemerintah terus mengeluarkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia di tahun 2020 sebesar 27,55 juta jiwa atau sebesar 10,19%.

Menurut koto (2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan. Kuncoro (2006) menyebutkan bahwa kemiskinan menggambarkan seseorang yang tidak mampu memenuhi batas standar hidup. Menurut Puspita (2015), kemiskinan merupakan masalah sosial bagi seluruh negara khususnya Indonesia yang merupakan negara

berkembang, karena kemiskinan bersifat multidimensional yang mempunyai dua aspek yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer terdiri dari miskin akan asset, pengetahuan, dan organisasi sosial politik, sedangkan aspek sekunder terdiri dari miskin akan sumber-sumber keuangan, jaringan sosial dan informasi. World Bank (2002) menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu karakteristik makro, sektor, individu, komunitas, rumah tangga. Akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan kekhawatiran terhadap kondisi masyarakat yaitu rendahnya kualitas pendidikan, ditambah terbatasnya lapangan pekerjaan, dan fasilitas umum yang kurang memadai seperti rumah sakit, sekolah, dan akses jalan raya, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas SDM.

Kondisi tersebut juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Adapun data jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2020 disajikan di tabel 1.1 berikut:

*Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah (2010 - 2020)*

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
1	2010	5 217,20	16,11
2	2011	5 256,00	16,21
3	2012	4 863,50	14,98
4	2013	4 811,30	14,44
5	2014	4 561,82	13,58
6	2015	4 577,00	13,58
7	2016	4 506,89	13,27
8	2017	4 450,72	13,01
9	2018	3 897,20	11,32
10	2019	3 743,23	10,80
11	2020	3 980,90	11,41

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2010 - 2020*

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2010 – 2011 persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 16.11% menjadi

16.21%, namun pada tahun 2011 hingga 2019 mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2011 ke 2012 tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16.21% menjadi 14.98%, kemudian pada tahun 2013 turun menjadi 14.44%, pada tahun 2014 turun menjadi 13.58%, tahun 2015 turun menjadi 13.58%, tahun 2016 turun menjadi 13.27%, tahun 2017 turun menjadi 13.01%, tahun 2018 turun menjadi 11.32%, tahun 2019 turun menjadi 10.80%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan tipis menjadi sebesar 11.41%. Hal itu disebabkan karena adanya wabah covid-19 yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan menyebabkan pendapatannya menurun sehingga menyebabkan kemiskinan. Secara keseluruhan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih relatif tinggi. Namun, perkembangan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah cukup baik, karena setiap tahunnya mengalami penurunan. Upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal meningkatkan pendapatan, tingkat lapangan pekerjaan, tingkat Pendidikan, dan tingkat Kesehatan sudah cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto merupakan faktor penting yang dapat menekan kemiskinan di sebuah wilayah. Laju pertumbuhan PDRB juga dianggap sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi, produktivitas masyarakat, kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyerap tenaga kerja tersebut. Jika laju pertumbuhan PDRB menunjukkan hasil tinggi maka pendapatan regional suatu wilayah mendapatkan hasil yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika laju pertumbuhan PDRB menunjukkan hasil rendah maka pendapatan regional suatu wilayah juga rendah. Rendahnya pendapatan regional akan mengakibatkan terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Arsyad (1997) menyatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Jika di suatu daerah mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi, maka dapat diartikan masyarakat di daerah tersebut banyak yang tidak memiliki pendapatan atau penghasilan yang cukup.

Hal itu dapat menyebabkan sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan lain lain.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Menurut Amami & Asmara (2022), PAD adalah pendapatan yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri, seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain yang sah serta didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan digunakan juga untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan khusus di daerah, seperti untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jadi, ketika dana PAD, DAU, DAK mengalami peningkatan maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Penelitian ini dilakukan karena masih sedikit peneliti yang menggunakan variabel laju pertumbuhan PDRB untuk menganalisis kemiskinan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan (Studi kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?

4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis atau peneliti, untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama menempuh proses kuliah dan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi tambahan.
3. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Menyajikan tentang pengkajian hasil dari penelitian penelitian sebelumnya. Adapun landasan teori tentang, teori kemiskinan, teori pengangguran, teori pendapatan asli daerah, teori dana alokasi umum, teori dana alokasi khusus, dan teori produk domestik regional bruto.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang variabel penelitian, definisi operasional variabel, metode analisis yang digunakan dalam penelitian, jenis dan cara mengumpulkan data.

## **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang obyek penelitian, yaitu kondisi tingkat kemiskinan, tingkat pertumbuhan terbuka, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan dan memperkuat hasil analisis dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah:

Amami & Asmara (2022) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020 dengan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel PAD secara positif mempengaruhi kemiskinan, DAU secara negatif signifikan mempengaruhi kemiskinan, DAK secara negatif tidak mempengaruhi kemiskinan, dan belanja modal secara positif tidak mempengaruhi kemiskinan.

Berliani (2021) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2020 dengan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menghasilkan variabel tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan laju pertumbuhan penduduk positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Fitriyanti & Handayani (2020) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 dengan metode analisis *Fixed Effect Model* (FEM). Penelitian ini menghasilkan bahwa PAD secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, DAK secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, belanja daerah signifikan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Andhykha et al. (2018) meneliti tentang Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan alat analisis Fixed Effect Model (FEM). penelitian menghasilkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pengangguran secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, sedangkan IPM secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Astuti (2018) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor dengan metode analisis regresi linier. Penelitian ini menghasilkan variabel PDRB secara negatif dan tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pendidikan, angka melek huruf, dan pengangguran secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Koto (2016) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dengan metode analisis regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU secara signifikan mempengaruhi kemiskinan, variabel DAU secara signifikan tidak mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Puspita (2015) meneliti tentang Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah periode 2008 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel pengangguran dan populasi jumlah penduduk secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, variabel PDRB secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat



kemiskinan, kemudian variabel angka melek huruf tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Bintang & Woyanti (2018) meneliti tentang Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 dengan metode analisis Fixed Effect Model (FEM). Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel pertumbuhan PDRB dan pengangguran secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat rata-rata lama sekolah dan tingkat harapan hidup secara negatif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

No	Penulis (tahun)	Judul	Metode Analisis	Hasil
1	Amami & Asmara (2022)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi	Regresi linier berganda	Variabel PAD secara positif mempengaruhi kemiskinan, DAU secara negatif signifikan mempengaruhi kemiskinan, DAK secara negatif tidak mempengaruhi kemiskinan, dan belanja modal secara positif tidak mempengaruhi kemiskinan.
2	Berliani (2021)	Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020	regresi linier berganda	Variabel tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan laju pertumbuhan penduduk positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.
3	Fitriyanti & Handayani (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Fixed Effect	Variabel PAD secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, DAK secara negatif signifikan mempengaruhi

		Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)	Model (FEM)	tingkat kemiskinan, belanja daerah signifikan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
4	Andhykha et al. (2018)	Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV)	Variabel laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pengangguran secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, sedangkan IPM secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.
5	Astuti (2018)	Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor)	Regresi linier	Variabel PDRB secara negatif dan tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pendidikan, angka melek huruf, dan pengangguran secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.
6	Koto (2016)	Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi	Regresi linier berganda	Variabel PAD dan DAU secara signifikan mempengaruhi kemiskinan, variabel DAU secara signifikan tidak mempengaruhi kemiskinan

		Sebagai Variabel Intervening		
7	Puspita (2015)	Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Regresi data panel	Variabel pengangguran dan populasi jumlah penduduk secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, variabel PDRB secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, kemudian variabel angka melek huruf tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan.
8	Bintang & Woyanti (2018)	Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah	Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV)	Variabel pertumbuhan PDRB dan pengangguran secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat rata-rata lama sekolah dan tingkat harapan hidup secara negatif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Kemiskinan

Menurut BPS (2018), kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi standar hidup minimum atau kebutuhan pokok makanan maupun non makanan. Menurut satuan ukurannya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah kondisi ini terjadi karena perbedaan pendapatan dalam kelompok masyarakat. Sedangkan, kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi saat keadaan pendapatan masyarakat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, kemiskinan juga dapat dibedakan menurut satuan waktunya yaitu *accidental poverty*, *seasonal poverty*, *persistent poverty*, dan *cyclical poverty*. *Accidental poverty* merupakan kondisi

kemiskinan yang terjadi karena kebijakan pemerintah, atau hal-hal diluar kendali seperti bencana alam yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. *Seasonal poverty* merupakan kondisi kemiskinan musiman yang sering dialami oleh pekerja nelayan dan petani tradisional. *Persistent poverty* merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi secara turun-temurun dan sering terjadi dalam lingkungan keluarga. *Cyclical poverty* merupakan kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh siklus perekonomian secara agregat.

Kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat luas dan tak kunjung teratasi, dimana kemiskinan ini sudah menjadi masalah umum di berbagai negara berkembang seperti Indonesia. Adapun ciri-ciri dari kemiskinan, yaitu:

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok atau dasar
2. Ketidakmampuan untuk berusaha
3. Tidak adanya jaminan masa depan
4. Sumber Daya Manusia yang rendah
5. Keterbatasan Sumber Daya Alam
6. Keterbatasan akses lapangan pekerjaan

Maka dari itu, pemerintah seharusnya memiliki kejelasan dalam kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah harus mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar mengalami kemiskinan supaya kebijakan untuk mengatasi kemiskinan akan lebih terarah dan tepat sasaran.

### **2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Menurut Sukirno (2010), pengangguran adalah seseorang dalam kondisi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Dalam mengukur pengangguran ini digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dimana tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan seberapa besar penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Usia kerja biasanya adalah pada usia 15 tahun ke atas dan tidak dalam masa. Pengangguran juga dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya dan pengangguran berdasar sifatnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya mempunyai beberapa jenis, yaitu:

- a. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah yang terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara kemampuan pekerja dengan lapangan pekerjaan. Selain itu, informasi tentang lowongan kerja dan calon karyawan tidak sempurna.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran ini disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi. Contohnya ketika perekonomian mengalami kemunduran, maka kegiatan produksi dalam industri juga akan menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur.

c. Pengangguran Teknologi

Pengangguran jenis ini disebabkan karena adanya perubahan teknologi sehingga pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh tenaga manusia mulai tergantikan oleh mesin-mesin canggih.

Sedangkan menurut Prasetyo (2015) pengangguran berdasarkan sifatnya juga terdapat beberapa jenis, yaitu:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan ketidakcocokan dengan lowongan pekerjaan tertentu. Selain itu, pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh menurunnya kegiatan ekonomi.

b. Pengangguran Setengah Menganggur

Pengangguran setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja dibawah jam normal yaitu 35 jam perminggu. Biasanya mereka hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu sampai empat jam sehari. Pengangguran ini juga bisa disebut *underemployment*.

c. Pengangguran Terselubung

Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang tidak bekerja secara optimal karena pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan atau keterampilan.

### 2.2.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Menurut Sukirno (2004), tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan

meningkatnya kemiskinan, karena seseorang yang menganggur akan memiliki pendapatan yang rendah, sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan menurunkan tingkat kemakmuran. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga produktivitasnya rendah dan dapat mengakibatkan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan TPT berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

#### **2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang bersumber dari ekonomi asli daerah tertentu dan dalam proses pemungutannya berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih detailnya, menurut Pasal 30 PP No 12 Tahun 2019 PAD merupakan wujud berbagai pendapatan yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Kutipan diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur untuk mengukur tingkat kemampuan daerah tertentu dalam melaksanakan otonomi daerah. Yang menjadi masalah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri.

#### **2.2.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan belum dapat menjelaskan pendapatan masyarakat akan mengalami kenaikan. Namun pada saat PAD mengalami kenaikan, pemerintah daerah mempunyai kesempatan menjadikan faktor sumber daya alam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, jika pemerintah daerah mengontrol sepenuhnya kebijakan otonomi daerah maka akan memberi peluang investor swasta masuk dan berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dengan membuat regulasi, sehingga ada harapan akan banyaknya kesempatan kerja yang akan mempengaruhi pendapatan masyarakat setempat. Maka dari itu, ketika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### 2.2.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

UU Nomor 33/2004 menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen penting yang berwujud dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) akan berfungsi untuk pemeratakan pendapatan dan membiayai program-program di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Daerah akan menerima transfer DAU yang cenderung kecil jika daerah tersebut memiliki sumber fiskal dengan jumlah yang cenderung besar, namun memiliki kebutuhannya kecil. Sedangkan daerah akan menerima transfer DAU yang relatif besar jika daerah tersebut memiliki sumber fiskal yang cenderung kecil, namun kebutuhannya besar. Dengan kata lain, pemerintah pusat akan mentransfer DAU dengan melihat pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan yang anggarannya telah tercantum di APBD setelah dikurangi dengan belanja pegawai.

Kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan sumber daya alam di daerahnya dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antardaerah. Permasalahan tersebut tidak dapat dihindari walaupun menggunakan desentralisasi fiskal. Maka dari itu, pemerintah pusat berinisiatif memberikan bantuan ke daerah-daerah dalam bentuk, agar masalah tersebut dapat diatasi dan tidak menimbulkan masalah lain. Ada beberapa cara untuk menghitung alokasi DAU, diantaranya:

- a. DAU disahkan dengan sedikit-dikitnya 26 persen pendapatan dari dalam negeri yang tercantum di dalam rencana anggaran.
- b. DAU yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dan provinsi masing-masing akan menerima 90 persen dan 10 persen dari DAU yang telah disahkan.
- c. DAU yang diberikan kepada kabupaten/kota tertentu disahkan dengan dasar perkalian seluruh DAU yang ditransfer kepada kabupaten/kota yang tercantum di dalam rencana anggaran dengan bagian kabupaten/kota terkait.
- d. Bagian besaran kabupaten/kota terdapat pada penjelasan di atas berlaku untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

### **2.2.7 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan**

Dalam APBD, pemerintah daerah memposisikan DAU sebagai sumber pendapatan terpenting. Hal ini karena DAU memberikan kontribusi paling besar terhadap kinerja keuangan daerahnya setiap tahunnya. Dengan kata lain, DAU dirancang untuk membantu daerah, terutama daerah yang memiliki sumber daya yang relatif rendah, sehingga dapat mendorong pembangunan daerah, mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hal ini mengindikasikan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### **2.2.8 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dana APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi dan fasilitas publik antardaerah serta sarana dan prasarana fisik sebagai target negara. Alokasi DAK ini diberikan pemerintah pusat yang memfokuskan dalam kebutuhan daerah yang tertinggal.

Pengelolaan DAK ini harus sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Didasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Alokasi Khusus di daerah pada pasal 32 ayat (1) s/d (3) yaitu:

- a. Diwajibkan mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK nya di dalam APBD.
- b. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu wajib menyiapkan Dana Pendamping dalam APBD minimal 10% dari total alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping berfungsi untuk menandai kegiatan fisik.
- c. Kepala Daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan triwulan tentang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir



tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.

Dapat disimpulkan bahwa DAK merupakan sebuah anggaran yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus daerah tersebut dengan mempertimbangkan tersedianya dana dalam APBN.

### **2.2.9 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan**

DAK ini bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan infrastruktur sehingga hanya daerah daerah tertentu saja yang mendapatkan DAK. Dana Alokasi Khusus juga harus digunakan secara optimal supaya berguna bagi kepentingan manusia. Apabila bidang-bidang tertentu seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, prasarana pemerintah daerah, pertanian, kelautan dan perikanan serta lingkungan hidup dibiayai secara maksimal, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

### **2.2.10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan menjadi pertumbuhan barang atau jasa oleh seluruh unit usaha di wilayah dan periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian yang menggambarkan pembangunan regional, sektoral, dan nasional.

Rumus Laju pertumbuhan PDRB:  $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$

Keterangan:

PDRB<sub>t</sub> = PDRB tahun tertentu

PDRB<sub>t-1</sub> = PDRB tahun sebelumnya

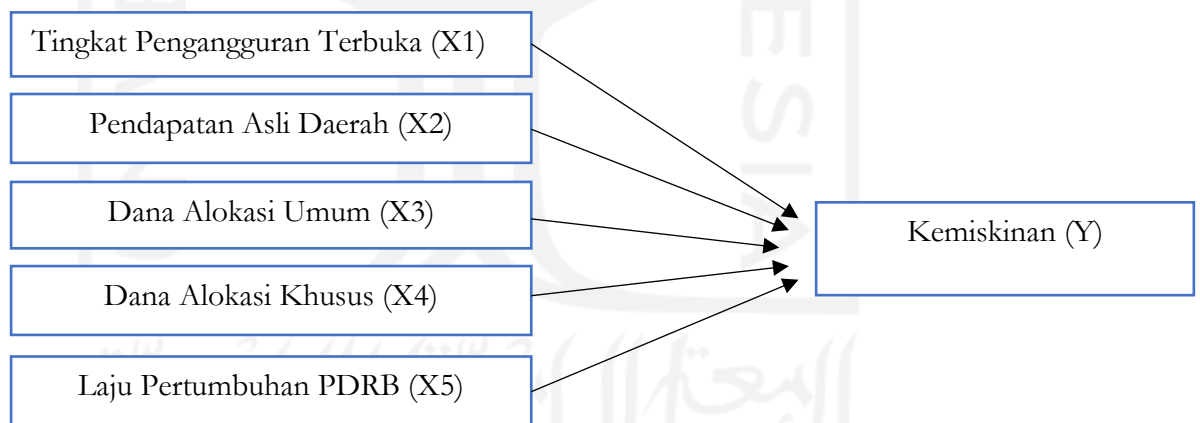
Menurut Astuti (2018), PDRB itu menunjukkan bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut. Maka dari itu, potensi faktor produksi di masing-masing daerah sangat berpengaruh terhadap seberapa besar PDRB yang dihasilkan oleh daerah tertentu. Bisa disimpulkan bahwa PDRB menjadi kekuatan dari setiap daerah karena di setiap daerah memiliki

keunggulan yang berbeda-beda, sehingga setiap daerah memiliki potensi yang membuat daerah tersebut akan akan naik tidaknya dalam nilai PDRB.

### 2.2.11 Pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan

Perbedaan definisi laju pertumbuhan PDRB dengan definisi Produk Domestik Regional Bruto tidak terlalu signifikan, sehingga laju pertumbuhan PDRB dengan PDRB tidak berbeda jauh dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. PDRB berfungsi untuk melihat perkembangan perekonomian daerah yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Laju pertumbuhan PDRB yang tinggi maka PDRB juga akan tinggi, yang berarti pertumbuhan PDRB lebih unggul dari tahun sebelumnya. Maka dari itu, ketika pertumbuhan PDRB meningkat maka penghasilan masyarakat akan ikut meningkat, sehingga secara perlahan-lahan tingkat kemiskinan akan berkurang. Hal ini mengindikasikan laju pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

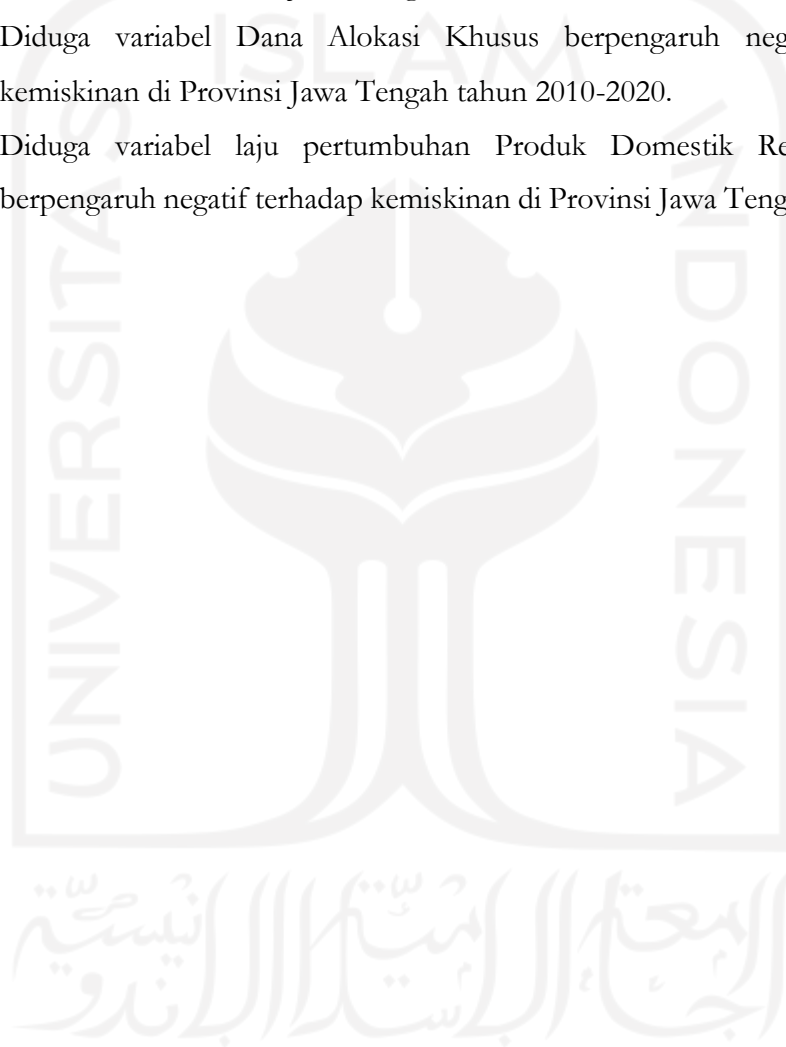


Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian hanya sebuah dugaan atau perkiraan yang selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini. Dengan mempertimbangkan penelitian dan studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, maka hipotesis disusun sebagai berikut:

1. Diduga variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
2. Diduga variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
3. Diduga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
4. Diduga variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
5. Diduga variabel laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2010-2020.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020. Data ini diambil melalui website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data ini berbentuk panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan data *time series* pada rentang waktu 2010-2020.

Penulis menggunakan 6 variabel dalam penelitian ini. Indikator-indikator tersebut adalah:

- a. Tingkat Kemiskinan yang merupakan variabel *dependen*.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka yang merupakan variabel *independen*.
- c. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan variabel *independen*.
- d. Dana Alokasi Umum yang merupakan variabel *independen*.
- e. Dana Alokasi Khusus yang merupakan variabel *independen*.
- f. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan variabel *independen*.

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

##### 3.2.1 Variabel Dependen

Tingkat kemiskinan adalah masyarakat di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 dengan satuan persen.

##### 3.2.2 Variabel Independen

1. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data dalam bentuk persentase tingkat

- pengangguran terbuka di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang bersumber dari ekonomi asli Provinsi Jawa Tengah dan dalam proses pemungutannya berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data dalam bentuk juta rupiah pendapatan asli daerah di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
  3. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari alokasi Dana Perimbangan pemerintah pusat kemudian diberikan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berfungsi untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data dalam bentuk juta rupiah dana alokasi umum di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
  4. Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dana anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana fisik sebagai target negara dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan fasilitas publik antardaerah. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data dalam bentuk juta rupiah dana alokasi khusus di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
  5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adalah pertumbuhan yang dihasilkan oleh barang dan/atau jasa di Provinsi Jawa Tengah dalam waktu tertentu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data dalam bentuk persentase pertumbuhan PDRB di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS).

### **3.3 Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan diolah melalui program *Eviews* 10. Data panel merupakan data yang menggabungkan antara data *cross section* dan data *time series*. Data yang diambil adalah data 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah pada rentang 2010-2020.

### 3.4 Metode Analisis Penelitian

Model dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Keterangan:

$Y$  = Tingkat Kemiskinan (persen)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$  = Koefisien regresi variabel independen

$X_1$  = Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

$X_2$  = Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)

$X_3$  = Dana Alokasi Umum (juta rupiah)

$X_4$  = Dana Alokasi Khusus (juta rupiah)

$X_5$  = Laju Pertumbuhan PDRB (persen)

$i$  = 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

$t$  = Tahun 2010-2020

$e$  = Komponen error

### 3.5 Estimasi Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan dalam melakukan estimasi regresi data panel, yaitu:

### 3.5.1 *Common Effect Model (CEM)*

Metode CEM adalah metode yang paling sederhana dibandingkan metode lainnya, karena di metode ini hanya cukup menyatukan data *cross section* dan data *time series*. Selain itu, metode CEM tidak memperhatikan adanya perbedaan individu dan waktu dengan asumsi bahwa memiliki perilaku yang sama.

### 3.5.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Metode FEM merupakan metode yang digunakan untuk mengolah data dengan cara membedakan intersep pada setiap objeknya dengan asumsi *slope*-nya akan tetap sama. Pada metode ini diperlukan variabel tambahan yaitu variabel dummy yang memiliki fungsi untuk melacak perbedaan pada data dan periode tertentu. Metode FEM ini cocok untuk digunakan untuk mengetahui perilaku setiap data. Namun, metode ini memiliki kelemahan yakni berkurangnya derajat kebebasan (*degree off freedom*) yang mengakibatkan berkurangnya efisien parameter.

### 3.5.3 *Random Effect Model (REM)*

Akibat adanya kelemahan pada metode FEM sehingga muncul metode REM yang berfungsi untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan cara melibatkan variabel gangguan atau biasa disebut *error terms*. Pada variabel gangguan ini memungkinkan adanya hubungan antar objek sehingga dapat mengatasi *heteroskedastisitas*.

## 3.6 Penentu Model Estimasi

### 3.6.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji chow dilakukan untuk mendapatkan metode yang lebih baik antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Adapun hipotesis uji chow, yaitu:

$H_0$  = Model *common effect* terpilih jika nilai prob. F lebih besar dibandingkan  $\alpha = 5\%$ .

$H_1$  = Model *fixed effect* terpilih jika nilai prob. F lebih kecil dibandingkan  $\alpha = 5\%$ .

### 3.6.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji hausman dilakukan untuk mendapatkan model lebih baik dengan cara membandingkan *random effect model* atau *fixed effect model*. Adapun hipotesis uji hausman, yaitu:

$H_0$  = Model *random effect* terpilih jika nilai Chi-Squarenya lebih besar dibandingkan  $\alpha = 5\%$ .

$H_1$  = Model *fixed effect* terpilih jika nilai Chi-Squarenya lebih kecil dibandingkan  $\alpha = 5\%$ .

### 3.7 Uji Statistik

Dalam uji statistik ini, terdapat beberapa langkah pengujian yaitu, Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Parsial (Uji t).

#### 3.7.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel terikat dalam sebuah penelitian. Pada uji koefisien determinasi terdapat angka antara nol sampai satu. Apabila nilainya semakin besar atau mendekati angka satu maka semakin bagus variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Jika nilai koefisiennya kecil atau mendekati nol maka variabel bebasnya kurang baik dalam hal menjelaskan variabel.

#### 3.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian statistik dengan uji F berfungsi untuk melihat apakah semua variabel bebas secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan dalam uji F, yaitu:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Ketika nilai prob. F-hitung  $< 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) maka kita akan menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang artinya seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan. Namun, apabila nilai probabilitas F-hitung kurang dari 0,05 maka gagal



menolak  $H_0$  dan menolak  $H_1$  yang berarti seluruh variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.

### 3.7.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial t berfungsi untuk melihat pengaruh satu persatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila nilai probabilitas t-hitung kurang dari 0,05 maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, nilai probabilitas t-hitung kurang dari maka gagal menolak  $H_0$  dan menolak  $H_1$  yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross-section* dengan kata lain data yang terdiri dari beberapa objek dengan banyak kurun waktu. Adapun data *time series* yang digunakan dengan kurun waktu 2010 hingga 2020 dan data *cross-section* di Provinsi Jawa Tengah. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kemiskinan sebagai variabel dependen dan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Laju Pertumbuhan PDRB sebagai variabel independen. Proses analisis yang dilakukan penelitian ini dibantu oleh program *software Eviews 10*. Adapun statistik deskriptif yang disajikan di tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

	KEMISKINAN	TPT	PAD	DAU	DAK	LAJU_PDRB
Mean	12.99579	5.499143	272.0092	865.0177	172.8965	4.727558
Median	12.62000	5.160000	239.3402	850.3772	93.89240	5.390000
Maximum	24.58000	14.22000	2516.647	10218.71	1081.574	23.54000
Minimum	3.980000	1.500000	32.71058	238.0690	3.750100	-10.36000
Std. Dev.	4.486530	2.015998	251.5243	550.0716	142.3699	2.480149
Skewness	0.347421	0.897873	4.692847	12.78384	1.199545	-1.036863
Kurtosis	2.534007	4.236771	33.68304	218.4455	5.897790	16.72245
Jarque-Bera	11.22846	76.26706	16515.54	755088.7	227.0348	3089.720
Probability	0.003646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	5003.380	2117.170	104723.5	333031.8	66565.15	1820.110
Sum Sq. Dev.	7729.516	1560.671	24293558	1.16E+08	7783368.	2362.038
Observations	385	385	385	385	385	385

Sumber: Hasil olahan Eviews 10

Tabel 4.1 menunjukkan observasi sebanyak 385 kali dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2020. Selama 11 tahun variabel kemiskinan mendapatkan rata-rata sebesar 12.99579%, nilai terendahnya sebesar 3.980000% dan tertingginya sebesar 24.58000% serta nilai standar deviasinya sebesar 4.486530%.

Variabel TPT mendapatkan rata-rata sebesar 5.499143%, nilai minimumnya sebesar 1.500000% dan mendapatkan nilai tertinggi sebesar 24.580000% serta standar deviasinya sebesar 2.015998%. Variabel PAD mendapatkan rata-rata sebesar 272.0092 juta rupiah dengan nilai terendahnya sebesar 32.71058 juta rupiah dan nilai tertingginya sebesar 2516.647 juta rupiah serta standar deviasinya sebesar 251.5243 juta rupiah. Variabel DAU mendapatkan rata-rata sebesar 865.0177 juta rupiah dengan nilai terendahnya sebesar 238.0690 juta rupiah dan nilai maksimumnya sebesar 10218.71 juta rupiah serta standar deviasinya sebesar 550.0716 juta rupiah. Variabel DAK mendapatkan rata-rata sebesar 172.8965 juta rupiah dengan nilai terendahnya sebesar 3.750100 dan nilai tertingginya sebesar 1081.574 juta rupiah serta standar deviasinya sebesar 142.3699 juta rupiah. Terakhir, variabel laju pertumbuhan PDRB mendapatkan rata-rata sebesar 4.727558% dengan nilai terendahnya sebesar -10.360000% dan nilai tertingginya sebesar 23.540000% serta standar deviasinya sebesar 2.480149%.

## 4.2 Hasil dan Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel yang terdiri dari *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* yang harus dipilih untuk mendapatkan jenis model terbaik. Pemilihan model terbaik yang akan digunakan dapat diuji melalui Uji Chow untuk pemilihan model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dan Uji Hausman untuk pemilihan model terbaik antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*.

### 4.2.1 Common Effect Model (CEM)

Tabel 4. 2 Hasil Uji Common Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/12/22 Time: 21:05  
 Sample: 2010 2020  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.86139	1.011929	11.72156	0.0000
TPT	0.108310	0.109137	0.992423	0.3216
PAD	-0.007786	0.000913	-8.525988	0.0000
DAU	0.001753	0.000401	4.365345	0.0000
DAK	0.002001	0.001777	1.126024	0.2609

LAJU_PDRB	0.168092	0.088981	1.889078	0.0596
R-squared	0.192865	Mean dependent var	12.99579	
Adjusted R-squared	0.182216	S.D. dependent var	4.486530	
S.E. of regression	4.057231	Akaike info criterion	5.654340	
Sum squared resid	6238.766	Schwarz criterion	5.715949	
Log likelihood	-1082.460	Hannan-Quinn criter.	5.678775	
F-statistic	18.11238	Durbin-Watson stat	0.199665	
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10*

Tabel 4.2 menunjukkan hasil  $R^2$  yang bersumber dari R-squared sebesar 0.192865, yang berarti variabel terikat mampu menjelaskan variabel bebas sebanyak 19,28% dan sebanyak 80,72% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

#### 4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

*Tabel 4. 3 Hasil Uji Fixed Effect Model*

Dependent Variable: KEMISKINAN  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/12/22 Time: 21:09  
Sample: 2010 2020  
Periods included: 11  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.63527	0.429718	31.73073	0.0000
TPT	0.189401	0.049024	3.863440	0.0001
PAD	-0.001915	0.000481	-3.979953	0.0001
DAU	-0.000342	0.000132	-2.589229	0.0100
DAK	-0.007301	0.000626	-11.66852	0.0000
LAJU_PDRB	0.084167	0.027652	3.043740	0.0025

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.937629	Mean dependent var	12.99579
Adjusted R-squared	0.930578	S.D. dependent var	4.486530
S.E. of regression	1.182114	Akaike info criterion	3.270580
Sum squared resid	482.1012	Schwarz criterion	3.681307
Log likelihood	-589.5866	Hannan-Quinn criter.	3.433476
F-statistic	132.9840	Durbin-Watson stat	1.057908
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10*

Tabel 4.3 menunjukkan hasil  $R^2$  yang bersumber dari R-squared sebesar 0.937629, yang berarti variabel terikat mampu menjelaskan variabel bebas sebanyak 93,76% dan sebanyak 6,24% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### 4.2.3 Random Effect Model (REM)

Tabel 4. 4 Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 06/12/22 Time: 21:09  
 Sample: 2010 2020  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 385  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.65744	0.697253	19.58748	0.0000
TPT	0.183674	0.048591	3.780007	0.0002
PAD	-0.002142	0.000474	-4.514896	0.0000
DAU	-0.000305	0.000132	-2.316302	0.0211
DAK	-0.007068	0.000623	-11.34695	0.0000
LAJU_PDRB	0.084000	0.027610	3.042374	0.0025

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		3.265528	0.8841
Idiosyncratic random		1.182114	0.1159

Weighted Statistics			
R-squared	0.564849	Mean dependent var	1.410071
Adjusted R-squared	0.559108	S.D. dependent var	1.842538
S.E. of regression	1.223440	Sum squared resid	567.2892
F-statistic	98.39223	Durbin-Watson stat	0.877135
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.006622	Mean dependent var	12.99579
Sum squared resid	7678.332	Durbin-Watson stat	0.064804

Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10

Tabel 4.4 menunjukkan hasil  $R^2$  yang bersumber dari R-squared sebesar 0.564849, yang berarti variabel terikat menjelaskan variabel bebas sebanyak 56,48% dan sebanyak 43,52% dijelaskan oleh variabel diluar model.

### 4.3 Hasil Pengujian Regresi Model Data Panel

#### 4.3.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow digunakan untuk melihat model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Apabila nilai prob.  $F > 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) maka kita akan menerima  $H_0$  dan menggunakan model *Common Effect* dengan apabila nilai prob.  $F < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) maka kita akan menerima  $H_1$  dengan menggunakan model *Fixed Effect*. Berikut adalah hasil dari regresi Uji Chow:

Tabel 4. 5 Hasil Regresi Uji Chow dengan Redundant Test

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: UJI\_FEM  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	121.163806	(34,345)	0.0000
Cross-section Chi-square	985.747699	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: KEMISKINAN  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/12/22 Time: 21:08  
Sample: 2010 2020  
Periods included: 11  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.86139	1.011929	11.72156	0.0000
TPT	0.108310	0.109137	0.992423	0.3216
PAD	-0.007786	0.000913	-8.525988	0.0000
DAU	0.001753	0.000401	4.365345	0.0000
DAK	0.002001	0.001777	1.126024	0.2609
LAJU_PDRB	0.168092	0.088981	1.889078	0.0596

R-squared	0.192865	Mean dependent var	12.99579
Adjusted R-squared	0.182216	S.D. dependent var	4.486530
S.E. of regression	4.057231	Akaike info criterion	5.654340
Sum squared resid	6238.766	Schwarz criterion	5.715949
Log likelihood	-1082.460	Hannan-Quinn criter.	5.678775
F-statistic	18.11238	Durbin-Watson stat	0.199665
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10

Tabel 4.5 menunjukkan nilai *Cross-section Chi-square* sebesar 985.747699 dengan prob 0.0000 yang mana lebih kecil dibandingkan alpha ( $\alpha$ ) = 5% sehingga model terbaik yang digunakan dalam uji hipotesis adalah *Fixed Effect Model*.

#### 4.3.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Hipotesis Uji Hausman, yaitu:

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Apabila nilai prob. Chi-square > 0,05 ( $\alpha$  = 5%) maka kita akan menerima  $H_0$  dengan menggunakan model *Random Effect*, tetapi apabila nilai prob. Chi-square < 0,05 ( $\alpha$  = 5%) maka kita akan menerima  $H_1$  dengan model *Fixed Effect*. Berikut merupakan hasil regresi dari Uji Hausman:

Tabel 4. 6 Hasil Regresi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: UJI\_REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	31.962051	5	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TPT	0.189401	0.183674	0.000042	0.3784
PAD	-0.001915	-0.002142	0.000000	0.0045
DAU	-0.000342	-0.000305	0.000000	0.0000
DAK	-0.007301	-0.007068	0.000000	0.0001
LAJU_PDRB	0.084167	0.084000	0.000002	0.9132

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: KEMISKINAN  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/12/22 Time: 21:10  
Sample: 2010 2020  
Periods included: 11  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	13.63527	0.429718	31.73073	0.0000
TPT	0.189401	0.049024	3.863440	0.0001
PAD	-0.001915	0.000481	-3.979953	0.0001
DAU	-0.000342	0.000132	-2.589229	0.0100
DAK	-0.007301	0.000626	-11.66852	0.0000
LAJU_PDRB	0.084167	0.027652	3.043740	0.0025

---

Effects Specification

---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.937629	Mean dependent var	12.99579
Adjusted R-squared	0.930578	S.D. dependent var	4.486530
S.E. of regression	1.182114	Akaike info criterion	3.270580
Sum squared resid	482.1012	Schwarz criterion	3.681307
Log likelihood	-589.5866	Hannan-Quinn criter.	3.433476
F-statistic	132.9840	Durbin-Watson stat	1.057908
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10*

Tabel 4.6 diatas menunjukkan nilai *chi-square* sebesar 31.962051 dengan prob 0.000 yang mana lebih kecil dibandingkan alpha ( $\alpha$ ) = 5% sehingga model terbaik yang dapat digunakan untuk uji hipotesis adalah *Fixed Effect Model*.

#### 4.4 Hasil Pengujian Statistik

Berdasarkan dari uji chow dan uji hausman didapatkan model terbaik untuk penelitian ini adalah *fixed effect model*. *Fixed effect model* diketahui menjadi model yang terbaik untuk mengestimasi pengaruh TPT, PAD, DAU, DAK, dan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan.

*Tabel 4. 7 Hasil Regresi Fixed Effect*

Dependent Variable: KEMISKINAN  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/12/22 Time: 21:09  
Sample: 2010 2020  
Periods included: 11  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.63527	0.429718	31.73073	0.0000
TPT	0.189401	0.049024	3.863440	0.0001
PAD	-0.001915	0.000481	-3.979953	0.0001
DAU	-0.000342	0.000132	-2.589229	0.0100
DAK	-0.007301	0.000626	-11.66852	0.0000
LAJU_PDRB	0.084167	0.027652	3.043740	0.0025

---

Effects Specification

---



Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.937629	Mean dependent var	12.99579
Adjusted R-squared	0.930578	S.D. dependent var	4.486530
S.E. of regression	1.182114	Akaike info criterion	3.270580
Sum squared resid	482.1012	Schwarz criterion	3.681307
Log likelihood	-589.5866	Hannan-Quinn criter.	3.433476
F-statistic	132.9840	Durbin-Watson stat	1.057908
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber: Data olahan Eviews 10*

Berdasarkan estimasi model fixed effect di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 13.63527 + 0.189401\text{TPT} - 0.001915\text{PAD} - 0.000342\text{DAU} - 0.007301\text{DAK} + 0.084167\text{LAJU\_PDRB} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

#### 4.4.1.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel TPT, PAD, DAU, DAK, Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil estimasi *Fixed Effect Model* mendapatkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0.930578, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel TPT, PAD, DAU, DAK, Laju Pertumbuhan PDRB dapat menjelaskan variabel dependen Tingkat Kemiskinan sebesar 93% dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.

#### 4.4.1.2 Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji Simultan (uji F) digunakan untuk melihat pengaruh variabel TPT, PAD, DAU, DAK, Laju Pertumbuhan PDRB secara simultan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan. Hasil uji regresi dengan model *fixed effect* mendapatkan nilai prob(F-statistic) sebesar  $0.000000 < \alpha (\alpha) = 5\%$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel TPT, PAD, DAU, DAK, Laju Pertumbuhan PDRB secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

#### 4.4.1.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi model *fixed effect*, diperoleh:

1. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

Nilai koefisien variabel Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.189401 dengan nilai probabilitas  $0.0001 < 0.05$ , maka memiliki makna bahwa secara parsial variabel TPT secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah

Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar -0.001915 dengan nilai probabilitas  $0.0001 < 0.05$ , maka memiliki makna bahwa secara parsial variabel PAD secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

3. Variabel Dana Alokasi Umum

Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum sebesar -0.000342 dengan nilai probabilitas  $0.0100 < 0.05$ , maka memiliki makna bahwa secara parsial variabel DAU secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4. Variabel Dana Alokasi Khusus

Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Khusus sebesar -0.007301 dengan nilai probabilitas  $0.0000 < 0.005$ , maka memiliki makna bahwa secara parsial variabel DAK secara negatif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

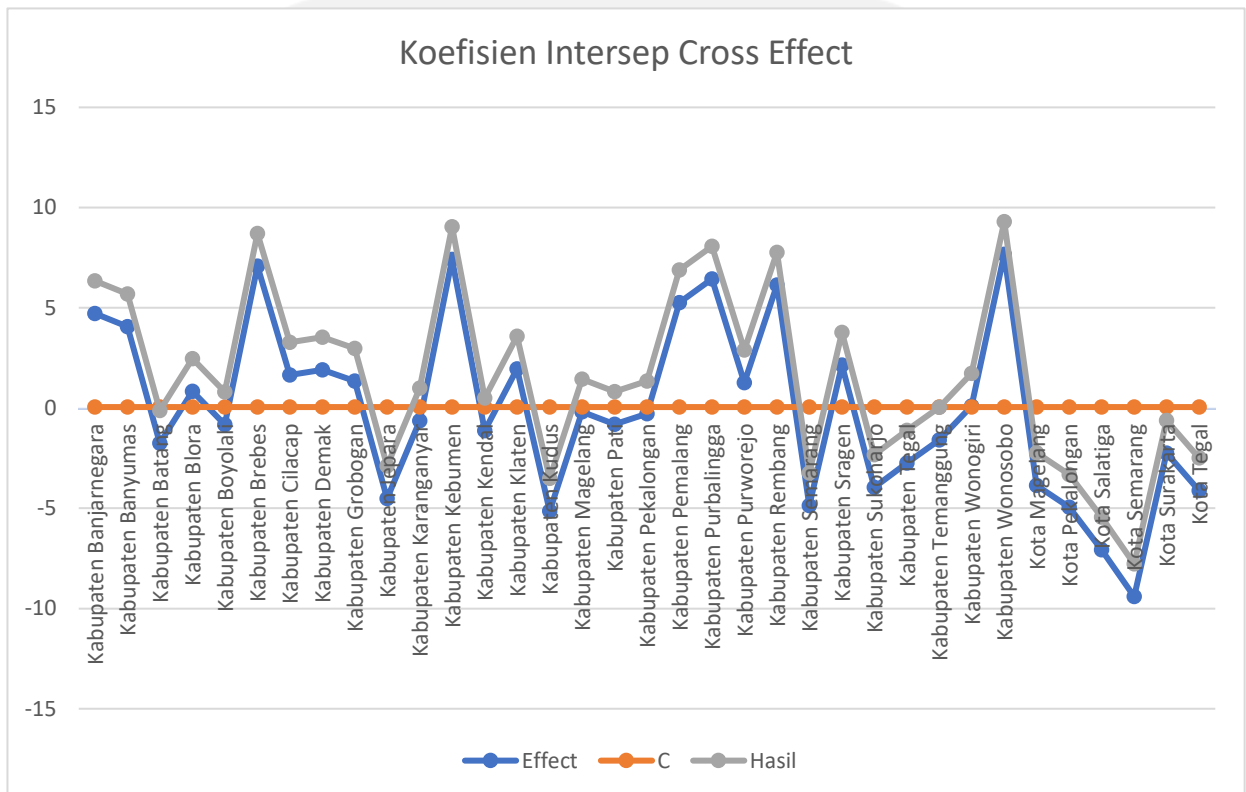
5. Variabel Laju Pertumbuhan PDRB

Nilai koefisien variabel Laju Pertumbuhan PDRB sebesar 0.084167 dengan nilai probabilitas  $0.0025 < 0.005$ , maka memiliki makna bahwa secara parsial variabel Laju Pertumbuhan PDRB secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

#### 4.4.1.4 Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda Cross Effect

Persamaan estimasi dengan memasukkan cross effect didapatkan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan estimasi dan koefisien pada cross effect yang mana koefisien cross effect sendiri terdapat di setiap unit dalam penelitian.

Grafik 4. 1 Koefisien Intersep Cross Effect

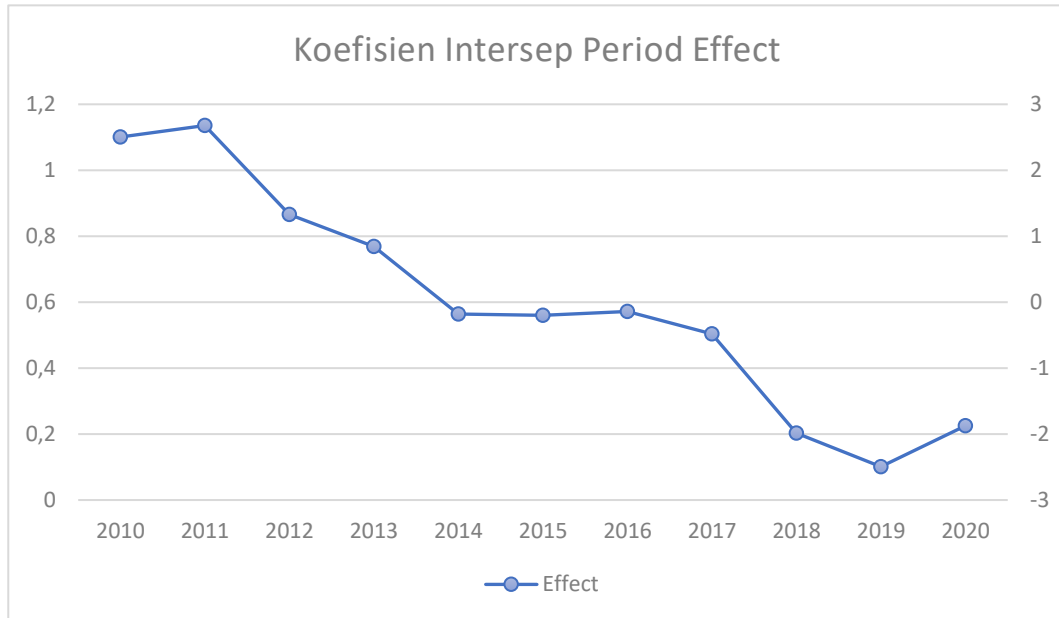


Sumber: Data olahan Eviews 10

Grafik 4.1 menunjukkan data koefisien intersep cross effect yang didapatkan dari hasil pengujian melalui model *fixed effect* dari data 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data *cross effect* tersebut memiliki hubungan yang positif atau selaras. Jadi, ketika nilai *effect* yang memiliki nilai tinggi maka hasil penjumlahannya akan mendapatkan nilai yang tinggi juga. Sebaliknya, apabila nilai *effect* yang mendapatkan nilai yang rendah maka hasil penjumlahan juga akan rendah juga. Contohnya di Kabupaten Kebumen memiliki nilai *effect* yang tinggi sehingga memiliki hasil yang juga tinggi, sebaliknya di Kabupaten Kendal memiliki nilai *effect* yang rendah maka akan mendapatkan hasil yang rendah juga.

#### 4.4.1.5 Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda Period Effect

Grafik 4. 2 Koefisien intersep Period Effect



Sumber: data olahan Eviews 10

Grafik 4.2 menunjukkan hasil koefisien period effect di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan nilai period effect yang tertinggi berada di tahun 2011 sebesar 2.677833 dan nilai yang terendah berada di tahun 2019 sebesar -2.49468.

#### 4.4.1.6 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil regresi dan uji hipotesis menggunakan *fixed effect model*, didapatkan interpretasi sebagai berikut:

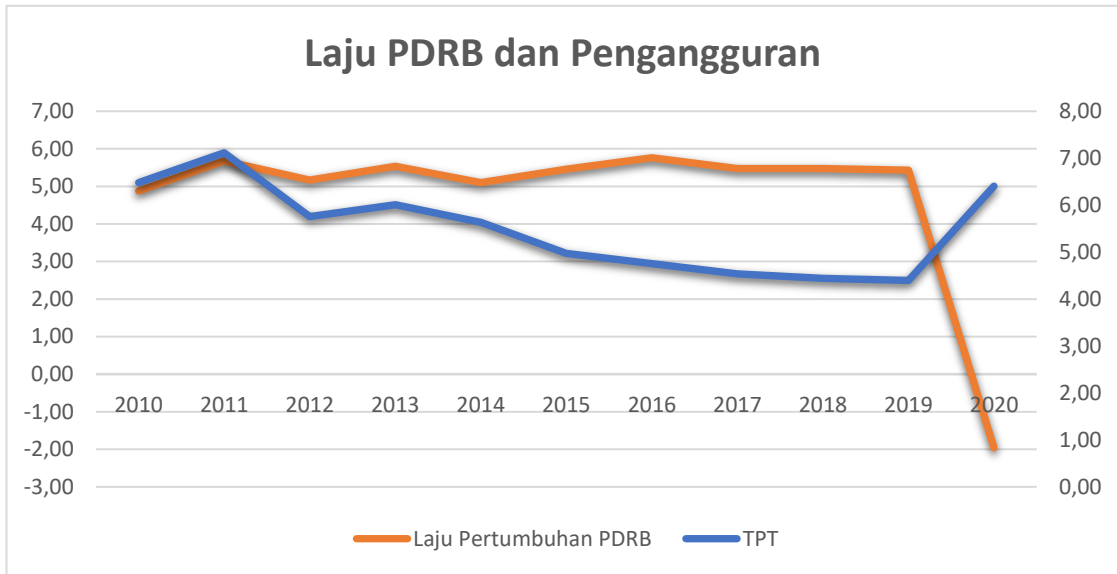
1. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar 0.189401 dan nilai probabilitas sebesar 0.0001 yang berarti jika TPT mengalami kenaikan sebesar 1% maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,19%. Analisis ini sesuai dengan hipotesis dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2015) dan Bintang & Woyanti (2018) yang menyatakan bahwa TPT secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pengangguran bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya lapangan pekerjaan dan pendidikan atau skill yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang

tersedia. Pengangguran juga dapat memberikan dampak buruk seperti menurunnya jumlah pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemakmuran masyarakat di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dan akhirnya dapat menyebabkan kemiskinan.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar  $-0.001915$  dan nilai probabilitas sebesar  $0.0001$  yang berarti jika PAD mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar  $0,0019\%$ . Analisis ini sesuai dengan hipotesis dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti & Handayani (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah Provinsi Jawa Tengah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar  $-0.000342$  dan nilai probabilitas sebesar  $0.0100$  yang berarti jika DAU mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar  $0,00034\%$ . Analisis ini sesuai dengan hipotesis dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amami & Asmara (2022) yang membuktikan bahwa anggaran yang tinggi dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum ini mampu membantu menutupi kekurangan dari pendapatan asli daerah sebagai upaya penanggulangan kesenjangan antar daerah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa DAU yang diberikan ke pemerintah daerah telah dikelola secara optimal dan digunakan sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu kesejahteraan dan kemajuan daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan yang belum merata. Maka dari itu, dengan adanya DAU yang tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar  $-0.007301$  dan nilai probabilitas sebesar  $0.0000$  yang berarti jika DAK mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar  $0,0073\%$ . Analisis ini sesuai dengan hipotesis dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti & Handayani (2020) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah yang belum mencapai standard tertentu dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintah daerah, dan lain-lain. Sehingga, semakin tinggi DAK maka bantuan pemerintah dalam pemberian layanan kepada masyarakat akan meningkat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
5. Variabel Laju Pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar  $0.084167$  dan nilai probabilitas sebesar  $0.0025$  yang berarti jika Laju Pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan  $1\%$  maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami kenaikan sebesar  $0,0841\%$ . Analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis, tetapi analisis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhykha et al. (2018) yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah Provinsi Jawa Tengah tidak merata dan didominasi oleh masyarakat berpendapatan tinggi yang memberikan kontribusi. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan ekonomi pada suatu daerah jika yang tidak diikuti oleh pemerataan. Grafik 5.1 data laju pertumbuhan PDRB dan pengangguran menunjukkan hubungan yang searah pada tahun 2010-2014 dan tahun 2016-2019, yang berarti bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan meningkatkan tingkat pengangguran, ketika penganggurannya bertambah banyak maka kesejahteraan masyarakat menurun dan pada akhirnya akan membawa ke dalam kemiskinan.

Grafik 5. 1 Laju Pertumbuhan PDRB dan Tingkat Pengangguran



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hingga 2020. Sehingga ketika terjadi peningkatan pengangguran maka akan menambah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang artinya pengangguran dapat memberikan dampak buruk seperti menurunnya jumlah pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemakmuran masyarakat di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dan akhirnya dapat menyebabkan kemiskinan.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hingga 2020. Sehingga ketika terjadi peningkatan PAD maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang artinya PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hingga 2020. Sehingga ketika terjadi peningkatan DAU maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang berarti bahwa DAU yang diberikan ke pemerintah daerah telah dikelola secara optimal dan digunakan sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu kesejahteraan dan kemajuan daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan yang belum merata.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hingga 2020. Sehingga ketika terjadi peningkatan DAK maka akan mengurangi



tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang berarti DAK sudah dikelola secara optimal dan dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah yang belum mencapai standard tertentu. Sehingga, semakin tinggi DAK maka bantuan pemerintah dalam pemberian layanan kepada masyarakat akan meningkat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

5. Variabel Laju Pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hingga 2020. Sehingga ketika terjadi peningkatan laju pertumbuhan PDRB maka akan menambah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tidak merata dan didominasi oleh masyarakat berpendapatan tinggi yang memberikan kontribusi. Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan meningkatkan tingkat pengangguran, ketika penganggurannya bertambah banyak maka kesejahteraan masyarakat menurun dan pada akhirnya akan membawa ke dalam kemiskinan.

## **5.2 Saran**

1. TPT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan investasi. Melalui investasi diharapkan perusahaan dapat meningkatkan usahanya sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
2. PAD, DAU, DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Ada beberapa sumber PAD potensial yang memberikan kontribusi yang cukup besar jika dikelola dengan baik, yakni Pajak Daerah seperti pajak burung walet serta pajak hotel dan restoran. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, jembatan, pariwisata supaya ekonomi daerah berkembang pesat sehingga dapat mengatasi kemiskinan.

3. Laju Pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam PDRB harapannya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menanggulangi masalah tersebut dengan cara mengembangkan sektor-sektor seperti industri, pertanian, pariwisata yang belum dikelola secara optimal supaya kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan dapat meningkat dan dapat mengatasi ketimpangan serta mengurangi tingkat kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113–123. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Arsyad, Lincolin. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Astuti, W. (2018). Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor). *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 1(3), 194–214. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v1i3.1286>
- Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2011). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2011&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>
- Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2012). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2012&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>
- Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2013). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2013&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2014). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2014&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2015). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2015&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2016). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2016&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2017). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2017&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2018). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2018&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2019). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2019>

&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten& Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan

Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2020). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari

<https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2020&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten& Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2020). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/64/4/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>

Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2020). Diakses tanggal 21 Januari 2022, dari <https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/14/1413/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-persen-2010---2020.html>

Berliani, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 872. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2244>

Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 20–28. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563>

Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9, 79–90. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3323/>

Koto, jolianis. (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan

Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Economica*, 4(2), 192–209.  
<https://doi.org/10.22202/economica.2016.v4.i2.633>

Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Machfud, Asnawi & Naz'aina (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 5 (1).

Masrofah, S. (2020). *Analisis Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

Prasetyo, N. R. (2015). *Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1991 – 2013*. 5.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jejak*, 8(1), 100–107. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>

Sukirno, S. (2010). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Grafindo Persada, Jakarta.

Sukirno, Sadono., 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta, Grafindo, Persada.

Wangke, F. Y., & Kainde, L. L. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Klabat Journal of Management*, 2(2), 98–122.  
<http://ejournal.unklab.ac.id/index.php/kjm/article/view/592>

World Bank Institute. 2002. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Edisi Terjemahan*. Badan Pusat Statistik, Jakarta

Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 8, 176–185.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan (%)	TPT (%)	PAD (juta rupiah)	DAU (juta rupiah)	DAK (juta rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
Kabupaten Banjarnegara	2010	19,17	3,1	63	593	69	4,89
Kabupaten Banjarnegara	2011	20,38	4,97	71	562	65	5,44
Kabupaten Banjarnegara	2012	18,87	3,69	94	681	68	5,23
Kabupaten Banjarnegara	2013	18,71	4,16	99	763	69	5,44
Kabupaten Banjarnegara	2014	17,77	4,06	162	826	61	5,31
Kabupaten Banjarnegara	2015	18,37	5,05	181	864	134	5,47
Kabupaten Banjarnegara	2016	17,46	4,885	221	977	252	5,44
Kabupaten Banjarnegara	2017	17,21	4,72	297	959	424	5,65
Kabupaten Banjarnegara	2018	15,46	3,99	236	959	365	5,67
Kabupaten Banjarnegara	2019	14,76	4,44	258	999	323	5,6
Kabupaten Banjarnegara	2020	15,64	5,86	263	1.015	352	-1,32
Kabupaten Banyumas	2010	20,2	7,37	165	720	76	5,77
Kabupaten Banyumas	2011	21,11	6,61	192	836	94	6,61
Kabupaten Banyumas	2012	19,44	5,11	242	992	119	5,88
Kabupaten Banyumas	2013	18,44	5,45	308	1.128	79	6,97
Kabupaten Banyumas	2014	17,45	5,37	436	1.225	83	5,67
Kabupaten Banyumas	2015	17,52	6,37	502	1.278	88	6,12
Kabupaten Banyumas	2016	17,23	5,495	541	1.399	413	6,05
Kabupaten Banyumas	2017	17,05	4,62	620	1.374	449	6,34
Kabupaten Banyumas	2018	13,5	4,15	648	1.374	478	6,45
Kabupaten Banyumas	2019	12,53	4,17	687	1.437	475	6,32
Kabupaten Banyumas	2020	13,26	6	730	1.461	544	-1,65
Kabupaten Batang	2010	14,67	6,48	45	414	46	4,97



Kabupaten Batang	2011	13,47	6,66	60	472	57	6,12
Kabupaten Batang	2012	12,4	5,88	85	577	55	4,62
Kabupaten Batang	2013	11,96	7,02	144	642	50	5,88
Kabupaten Batang	2014	11,13	7,42	173	682	52	5,31
Kabupaten Batang	2015	11,27	4,56	180	707	79	5,42
Kabupaten Batang	2016	11,04	5,19	210	791	204	5,03
Kabupaten Batang	2017	10,8	5,82	220	779	225	5,55
Kabupaten Batang	2018	8,69	4,2	238	781	231	5,72
Kabupaten Batang	2019	8,35	4,11	246	817	242	5,39
Kabupaten Batang	2020	9,13	6,92	246	836	266	-1,29
Kabupaten Blora	2010	16,27	5,49	50	485	35	5,04
Kabupaten Blora	2011	16,24	6,9	67	547	77	4,42
Kabupaten Blora	2012	15,1	4,75	82	673	54	4,9
Kabupaten Blora	2013	14,64	6,23	95	754	53	5,36
Kabupaten Blora	2014	13,66	4,3	145	824	61	4,39
Kabupaten Blora	2015	13,52	4,68	74	849	98	5,36
Kabupaten Blora	2016	13,33	3,765	184	943	277	23,54
Kabupaten Blora	2017	13,04	2,85	280	927	308	5,98
Kabupaten Blora	2018	11,9	3,3	203	927	333	4,38
Kabupaten Blora	2019	11,32	3,82	264	967	355	4,05
Kabupaten Blora	2020	11,96	4,89	237	883	276	-4,66
Kabupaten Boyolali	2010	13,72	3,9	86	588	56	3,6
Kabupaten Boyolali	2011	14,97	5,81	97	641	67	6,34
Kabupaten Boyolali	2012	13,88	4,43	128	780	60	5,33
Kabupaten Boyolali	2013	13,27	5,44	161	872	59	5,83
Kabupaten Boyolali	2014	12,36	4,95	228	943	81	5,42
Kabupaten Boyolali	2015	12,45	2,03	261	968	89	5,96
Kabupaten Boyolali	2016	12,09	2,85	292	1.033	280	5,33
Kabupaten Boyolali	2017	11,96	3,67	388	1.015	295	5,8
Kabupaten Boyolali	2018	10,04	2,18	343	1.015	381	5,72

Kabupaten Boyolali	2019	9,53	3,09	395	1.046	353	5,96
Kabupaten Boyolali	2020	10,18	5,28	369	1.064	391	-1,24
Kabupaten Brebes	2010	23,01	8,21	71	738	67	4,94
Kabupaten Brebes	2011	22,72	11,08	78	800	66	6,65
Kabupaten Brebes	2012	21,12	8,22	102	981	84	4,58
Kabupaten Brebes	2013	20,82	9,61	135	1.099	83	5,91
Kabupaten Brebes	2014	20	9,53	268	1.187	98	5,3
Kabupaten Brebes	2015	19,79	6,49	302	1.234	118	5,98
Kabupaten Brebes	2016	19,47	7,265	339	1.339	362	5,11
Kabupaten Brebes	2017	19,14	8,04	529	1.317	340	5,65
Kabupaten Brebes	2018	17,17	7,2	347	1.322	399	5,26
Kabupaten Brebes	2019	16,22	7,39	379	1.373	474	5,72
Kabupaten Brebes	2020	17,03	9,83	399	1.381	471	-0,59
Kabupaten Cilacap	2010	18,11	9,75	150	793	101	4,41
Kabupaten Cilacap	2011	17,15	10,82	172	877	102	4,07
Kabupaten Cilacap	2012	15,92	7,29	197	1.058	88	1,98
Kabupaten Cilacap	2013	15,24	6,68	279	1.197	1.082	1,66
Kabupaten Cilacap	2014	14,21	5,65	374	1.292	110	2,92
Kabupaten Cilacap	2015	14,39	8,01	410	1.333	173	5,96
Kabupaten Cilacap	2016	14,12	7,155	429	1.385	484	5,09
Kabupaten Cilacap	2017	13,94	6,3	646	1.360	441	2,58
Kabupaten Cilacap	2018	11,25	7,49	497	1.362	459	2,99
Kabupaten Cilacap	2019	10,73	7,24	574	1.423	444	2,27
Kabupaten Cilacap	2020	11,46	9,1	495	1.295	389	-10,36
Kabupaten Demak	2010	18,76	5,69	57	493	57	4,12
Kabupaten Demak	2011	18,21	5,03	75	544	68	5,39
Kabupaten Demak	2012	16,73	8,4	105	659	82	4,46
Kabupaten Demak	2013	15,72	7,08	138	738	77	5,27
Kabupaten Demak	2014	14,6	5,17	220	796	75	4,29
Kabupaten Demak	2015	14,44	6,02	254	833	100	5,93

Kabupaten Demak	2016	14,1	5,245	287	909	307	5,09
Kabupaten Demak	2017	13,41	4,47	310	893	293	5,82
Kabupaten Demak	2018	12,54	7,03	342	894	275	5,4
Kabupaten Demak	2019	11,86	5,42	407	946	295	5,36
Kabupaten Demak	2020	12,54	7,31	404	960	312	-0,23
Kabupaten Grobogan	2010	17,86	4,6	78	618	67	5,05
Kabupaten Grobogan	2011	17,38	5,33	88	669	78	3,19
Kabupaten Grobogan	2012	16,13	4,2	105	813	97	5,08
Kabupaten Grobogan	2013	14,87	6,1	144	907	104	4,57
Kabupaten Grobogan	2014	13,86	4,25	235	978	86	4,07
Kabupaten Grobogan	2015	13,68	5,22	273	1.009	131	5,96
Kabupaten Grobogan	2016	13,57	4,12	299	1.110	359	4,51
Kabupaten Grobogan	2017	13,27	3,02	440	1.092	383	5,85
Kabupaten Grobogan	2018	12,31	2,22	316	1.094	385	5,83
Kabupaten Grobogan	2019	11,77	3,54	345	1.145	385	5,37
Kabupaten Grobogan	2020	12,46	4,5	332	1.215	405	-1,59
Kabupaten Jepara	2010	10,18	4,56	85	530	64	4,52
Kabupaten Jepara	2011	10,32	5,48	104	592	71	4,92
Kabupaten Jepara	2012	9,38	4,29	129	713	76	5,86
Kabupaten Jepara	2013	9,23	6,34	134	814	67	5,39
Kabupaten Jepara	2014	8,55	5,09	232	888	89	4,81
Kabupaten Jepara	2015	8,5	3,12	270	936	137	5,1
Kabupaten Jepara	2016	8,35	3,98	323	1.000	339	5,06
Kabupaten Jepara	2017	8,12	4,84	331	983	292	5,39
Kabupaten Jepara	2018	7	3,75	369	985	315	5,85
Kabupaten Jepara	2019	6,66	2,92	385	1.040	320	6,02
Kabupaten Jepara	2020	7,17	6,7	386	949	275	-1,94
Kabupaten Karanganyar	2010	13,98	6,62	80	521	55	5,42
Kabupaten Karanganyar	2011	15,29	5,78	104	578	58	4,95
Kabupaten Karanganyar	2012	14,07	5,82	117	721	56	5,9

Kabupaten Karanganyar	2013	13,58	3,84	162	810	55	5,69
Kabupaten Karanganyar	2014	12,62	3,54	215	870	57	5,22
Kabupaten Karanganyar	2015	12,46	3,6	255	906	98	5,05
Kabupaten Karanganyar	2016	12,49	3,385	301	996	353	5,4
Kabupaten Karanganyar	2017	12,28	3,17	415	979	253	5,77
Kabupaten Karanganyar	2018	10,01	2,28	343	979	308	5,98
Kabupaten Karanganyar	2019	9,55	3,12	388	1.019	311	5,93
Kabupaten Karanganyar	2020	10,28	5,96	357	1.027	336	-1,87
Kabupaten Kebumen	2010	22,7	8,02	59	643	66	4,15
Kabupaten Kebumen	2011	24,06	4,73	74	732	79	6,15
Kabupaten Kebumen	2012	22,4	3,58	102	906	100	4,88
Kabupaten Kebumen	2013	21,32	3,52	131	10.219	79	4,57
Kabupaten Kebumen	2014	20,5	3,25	242	1.126	81	5,79
Kabupaten Kebumen	2015	20,44	4,14	245	1.146	166	6,28
Kabupaten Kebumen	2016	19,86	4,86	291	1.256	480	5,01
Kabupaten Kebumen	2017	19,6	5,58	444	1.234	438	5,15
Kabupaten Kebumen	2018	17,47	5,48	352	1.234	391	5,53
Kabupaten Kebumen	2019	16,82	4,69	409	1.280	387	5,52
Kabupaten Kebumen	2020	17,59	6,07	418	1.323	395	-1,46
Kabupaten Kendal	2010	14,47	5,57	86	521	59	5,97
Kabupaten Kendal	2011	14,26	6,54	93	569	67	6,57
Kabupaten Kendal	2012	13,17	6,31	120	703	64	5,21
Kabupaten Kendal	2013	12,68	6,43	136	788	42	6,22
Kabupaten Kendal	2014	11,8	6,15	215	852	48	5,14
Kabupaten Kendal	2015	11,62	7,07	239	885	62	5,21
Kabupaten Kendal	2016	11,37	6	265	973	228	5,56
Kabupaten Kendal	2017	11,1	4,93	405	956	249	5,78
Kabupaten Kendal	2018	9,84	6,02	336	956	296	5,77
Kabupaten Kendal	2019	9,41	6,26	351	998	309	5,71
Kabupaten Kendal	2020	9,99	7,56	425	1.006	331	-1,53

Kabupaten Klaten	2010	17,47	4,5	55	726	71	1,73
Kabupaten Klaten	2011	17,95	7,63	72	793	81	6,29
Kabupaten Klaten	2012	16,71	3,7	85	967	75	5,71
Kabupaten Klaten	2013	15,6	5,34	115	1.066	61	5,96
Kabupaten Klaten	2014	14,56	4,75	178	1.143	67	5,84
Kabupaten Klaten	2015	14,89	2,51	191	1.164	77	5,3
Kabupaten Klaten	2016	14,46	3,43	224	1.204	319	5,17
Kabupaten Klaten	2017	14,15	4,35	372	1.272	302	5,34
Kabupaten Klaten	2018	12,96	3,14	374	1.238	376	5,47
Kabupaten Klaten	2019	12,28	3,54	312	1.282	352	5,5
Kabupaten Klaten	2020	12,89	5,46	305	1.297	371	-1,18
Kabupaten Kudus	2010	9,01	6,22	94	463	31	4,17
Kabupaten Kudus	2011	9,45	8,32	108	489	38	4,24
Kabupaten Kudus	2012	8,63	5,89	121	638	58	4,11
Kabupaten Kudus	2013	8,62	8,07	145	719	52	4,36
Kabupaten Kudus	2014	7,99	5,03	234	796	41	4,43
Kabupaten Kudus	2015	7,73	5,04	255	785	61	3,88
Kabupaten Kudus	2016	7,65	4,3	292	822	228	2,54
Kabupaten Kudus	2017	7,59	3,56	366	808	257	3,21
Kabupaten Kudus	2018	6,98	3,28	337	807	239	3,24
Kabupaten Kudus	2019	6,68	3,8	344	851	237	3,1
Kabupaten Kudus	2020	7,31	5,53	379	849	237	-3,53
Kabupaten Magelang	2010	14,14	2,97	76	605	101	4,51
Kabupaten Magelang	2011	15,18	6,83	90	669	78	6,68
Kabupaten Magelang	2012	13,97	4,38	124	817	104	4,88
Kabupaten Magelang	2013	13,96	6,13	173	900	43	5,91
Kabupaten Magelang	2014	12,98	7,45	242	965	49	5,38
Kabupaten Magelang	2015	13,07	5,16	262	996	51	5,18
Kabupaten Magelang	2016	12,67	3,8	288	1.079	232	5,39
Kabupaten Magelang	2017	12,42	2,44	404	1.006	257	5,5

Kabupaten Magelang	2018	11,23	2,89	325	1.061	301	5,28
Kabupaten Magelang	2019	10,67	3,07	417	1.097	327	5,3
Kabupaten Magelang	2020	11,27	4,27	406	1.109	374	-1,68
Kabupaten Pati	2010	14,48	6,22	113	621	67	5,11
Kabupaten Pati	2011	14,69	11,17	134	692	65	5,91
Kabupaten Pati	2012	13,61	11,98	164	850	80	5,93
Kabupaten Pati	2013	12,94	7,29	169	960	73	5,97
Kabupaten Pati	2014	12,06	6,37	279	1.043	80	4,64
Kabupaten Pati	2015	11,95	4,43	309	1.087	93	6,01
Kabupaten Pati	2016	11,65	4,13	322	1.208	328	5,49
Kabupaten Pati	2017	11,38	3,83	428	1.186	463	5,67
Kabupaten Pati	2018	9,9	3,57	384	1.190	414	5,71
Kabupaten Pati	2019	9,46	3,64	364	1.240	372	5,86
Kabupaten Pati	2020	10,08	4,74	352	1.255	396	-1,15
Kabupaten Pekalongan	2010	16,29	4,04	68	490	64	4,27
Kabupaten Pekalongan	2011	15	6,91	81	554	64	5,66
Kabupaten Pekalongan	2012	13,85	5,08	115	679	77	4,81
Kabupaten Pekalongan	2013	13,51	4,78	148	769	61	5,99
Kabupaten Pekalongan	2014	12,57	6,03	255	832	60	4,95
Kabupaten Pekalongan	2015	12,84	5,1	252	862	90	4,78
Kabupaten Pekalongan	2016	12,9	4,745	311	927	223	5,19
Kabupaten Pekalongan	2017	12,61	4,39	305	910	343	5,44
Kabupaten Pekalongan	2018	10,06	4,36	311	915	347	5,76
Kabupaten Pekalongan	2019	9,71	4,35	341	974	326	5,35
Kabupaten Pekalongan	2020	10,19	6,97	467	980	340	-1,89
Kabupaten Pemalang	2010	19,96	11,45	76	620	62	4,94
Kabupaten Pemalang	2011	20,68	7,37	80	672	67	5,01
Kabupaten Pemalang	2012	19,27	4,85	98	827	93	5,32
Kabupaten Pemalang	2013	19,27	6,48	136	931	64	5,57
Kabupaten Pemalang	2014	18,44	7,44	217	1.017	54	5,52

Kabupaten Pemalang	2015	18,3	6,53	230	1.059	111	5,58
Kabupaten Pemalang	2016	17,58	6,06	275	1.198	270	5,43
Kabupaten Pemalang	2017	17,37	5,59	426	1.177	344	5,61
Kabupaten Pemalang	2018	16,04	6,17	300	1.181	332	5,69
Kabupaten Pemalang	2019	15,41	6,45	351	1.223	351	5,8
Kabupaten Pemalang	2020	16,02	7,64	309	1.242	362	-0,66
Kabupaten Purbalingga	2010	24,58	3,82	80	465	45	5,67
Kabupaten Purbalingga	2011	23,06	5,1	95	522	68	5,67
Kabupaten Purbalingga	2012	21,19	5,02	113	640	76	5,79
Kabupaten Purbalingga	2013	20,53	5,63	123	719	67	5,27
Kabupaten Purbalingga	2014	19,75	5,13	203	778	57	4,85
Kabupaten Purbalingga	2015	19,7	4,84	216	805	72	5,47
Kabupaten Purbalingga	2016	18,98	5,085	252	897	242	4,85
Kabupaten Purbalingga	2017	18,8	5,33	356	882	326	5,37
Kabupaten Purbalingga	2018	15,62	6,02	283	882	334	5,42
Kabupaten Purbalingga	2019	15,03	4,73	306	918	333	5,65
Kabupaten Purbalingga	2020	15,9	6,1	284	935	315	-1,23
Kabupaten Purworejo	2010	16,61	3,4	70	528	57	5,01
Kabupaten Purworejo	2011	17,51	5,3	89	586	61	5,64
Kabupaten Purworejo	2012	16,32	3,2	98	712	70	4,59
Kabupaten Purworejo	2013	15,44	5,15	128	794	53	4,94
Kabupaten Purworejo	2014	14,41	5,1	200	855	57	4,48
Kabupaten Purworejo	2015	14,27	4,01	234	876	86	5,33
Kabupaten Purworejo	2016	13,91	3,825	256	941	339	5,15
Kabupaten Purworejo	2017	13,81	3,64	299	924	251	5,27
Kabupaten Purworejo	2018	11,67	4,43	279	924	308	5,33
Kabupaten Purworejo	2019	11,45	2,91	280	963	310	5,44
Kabupaten Purworejo	2020	11,78	4,04	327	1.012	335	-1,66
Kabupaten Rembang	2010	23,4	4,89	66	411	49	4,45
Kabupaten Rembang	2011	23,71	7,22	74	469	62	5,19

Kabupaten Rembang	2012	21,88	5,75	103	570	78	5,32
Kabupaten Rembang	2013	20,97	5,97	127	640	42	5,43
Kabupaten Rembang	2014	19,5	5,23	180	701	46	5,15
Kabupaten Rembang	2015	19,28	4,51	201	723	98	5,5
Kabupaten Rembang	2016	18,54	3,85	234	785	108	5,28
Kabupaten Rembang	2017	18,35	3,19	318	772	111	6,98
Kabupaten Rembang	2018	15,41	2,83	306	772	259	5,89
Kabupaten Rembang	2019	14,95	3,6	308	800	213	5,2
Kabupaten Rembang	2020	15,6	4,83	307	811	264	-1,49
Kabupaten Semarang	2010	10,5	6,25	99	509	51	4,9
Kabupaten Semarang	2011	10,3	6,16	133	568	69	6,27
Kabupaten Semarang	2012	9,4	4,87	1.258	691	68	6,03
Kabupaten Semarang	2013	8,51	3,9	216	779	59	5,97
Kabupaten Semarang	2014	8,05	4,38	248	849	67	5,85
Kabupaten Semarang	2015	8,15	2,57	279	877	41	5,52
Kabupaten Semarang	2016	7,99	2,175	319	969	316	5,3
Kabupaten Semarang	2017	7,78	1,78	417	952	287	5,65
Kabupaten Semarang	2018	7,29	2,25	383	952	315	5,67
Kabupaten Semarang	2019	7,04	2,54	429	1.002	317	5,39
Kabupaten Semarang	2020	7,51	4,57	480	1.010	345	-2,67
Kabupaten Sragen	2010	17,49	4,09	80	562	122	6,09
Kabupaten Sragen	2011	17,95	8,43	95	618	72	6,55
Kabupaten Sragen	2012	16,72	5,88	128	779	69	6,12
Kabupaten Sragen	2013	15,93	5,63	147	869	62	6,7
Kabupaten Sragen	2014	14,87	6,04	254	947	76	5,59
Kabupaten Sragen	2015	14,86	4,51	268	977	150	6,05
Kabupaten Sragen	2016	14,38	4,53	297	1.068	334	5,77
Kabupaten Sragen	2017	14,02	4,55	405	1.049	318	5,97
Kabupaten Sragen	2018	13,12	4,83	334	1.049	329	5,75
Kabupaten Sragen	2019	12,79	3,32	368	1.083	385	5,9



Kabupaten Sragen	2020	13,38	4,75	338	1.106	364	-1,81
Kabupaten Sukoharjo	2010	10,94	7,4	64	517	49	4,65
Kabupaten Sukoharjo	2011	11,13	6,27	96	565	49	5,88
Kabupaten Sukoharjo	2012	10,15	6,1	165	680	48	5,9
Kabupaten Sukoharjo	2013	9,87	5,98	193	763	53	5,78
Kabupaten Sukoharjo	2014	9,18	4,6	265	827	57	5,4
Kabupaten Sukoharjo	2015	9,26	4,52	314	854	69	5,69
Kabupaten Sukoharjo	2016	9,07	3,395	363	960	287	5,72
Kabupaten Sukoharjo	2017	8,75	2,27	465	906	278	5,76
Kabupaten Sukoharjo	2018	7,41	2,72	433	906	287	5,79
Kabupaten Sukoharjo	2019	7,14	3,39	459	946	279	5,92
Kabupaten Sukoharjo	2020	7,68	6,93	332	954	301	-1,7
Kabupaten Tegal	2010	13,11	7,48	73	640	62	4,83
Kabupaten Tegal	2011	11,54	10,59	90	704	61	6,39
Kabupaten Tegal	2012	10,75	6,12	119	861	75	5,23
Kabupaten Tegal	2013	10,58	6,89	156	926	73	6,73
Kabupaten Tegal	2014	9,87	8,47	254	1.044	64	5,03
Kabupaten Tegal	2015	10,09	9,52	304	1.086	68	5,49
Kabupaten Tegal	2016	10,1	8,425	316	1.162	291	5,92
Kabupaten Tegal	2017	9,9	7,33	376	1.142	326	5,38
Kabupaten Tegal	2018	7,94	8,24	372	1.144	339	5,51
Kabupaten Tegal	2019	7,64	8,12	436	1.199	366	5,58
Kabupaten Tegal	2020	8,14	9,82	451	1.219	404	-1,46
Kabupaten Temanggung	2010	13,46	3,6	55	438	47	4,31
Kabupaten Temanggung	2011	13,38	3,54	63	483	57	6,09
Kabupaten Temanggung	2012	12,32	3,39	79	584	87	4,27
Kabupaten Temanggung	2013	12,42	4,87	102	651	42	5,2
Kabupaten Temanggung	2014	11,55	3,19	161	709	57	5,03
Kabupaten Temanggung	2015	11,76	1,5	212	732	73	5,24
Kabupaten Temanggung	2016	11,6	2,235	281	808	199	5,02

Kabupaten Temanggung	2017	11,46	2,97	308	794	228	5,03
Kabupaten Temanggung	2018	9,87	3,23	252	793	226	5,13
Kabupaten Temanggung	2019	9,42	2,98	278	829	259	5,05
Kabupaten Temanggung	2020	9,96	3,85	267	854	279	-2,13
Kabupaten Wonogiri	2010	15,67	4,7	65	617	72	5,87
Kabupaten Wonogiri	2011	15,74	3,82	77	682	78	3,58
Kabupaten Wonogiri	2012	14,67	3,46	101	828	75	5,94
Kabupaten Wonogiri	2013	14,02	3,61	112	917	76	4,78
Kabupaten Wonogiri	2014	13,09	3,45	182	1.001	59	5,26
Kabupaten Wonogiri	2015	12,98	3,07	211	1.031	86	5,4
Kabupaten Wonogiri	2016	13,12	2,725	219	1.145	289	5,25
Kabupaten Wonogiri	2017	12,9	2,38	334	1.125	361	5,32
Kabupaten Wonogiri	2018	10,75	2,28	269	1.125	380	5,41
Kabupaten Wonogiri	2019	10,25	2,55	287	1.181	391	5,14
Kabupaten Wonogiri	2020	10,86	4,27	252	1.193	393	-1,41
Kabupaten Wonosobo	2010	23,15	4,04	52	442	55	4,29
Kabupaten Wonosobo	2011	24,21	4,92	67	486	62	5,37
Kabupaten Wonosobo	2012	22,5	5,21	82	598	56	4,7
Kabupaten Wonosobo	2013	22,08	5,82	109	666	58	4
Kabupaten Wonosobo	2014	21,42	5,34	175	724	59	4,78
Kabupaten Wonosobo	2015	21,45	4,47	183	748	57	4,67
Kabupaten Wonosobo	2016	20,53	4,325	200	841	199	5,36
Kabupaten Wonosobo	2017	20,32	4,18	309	827	267	4,14
Kabupaten Wonosobo	2018	17,58	3,5	227	828	277	5,06
Kabupaten Wonosobo	2019	16,63	3,43	238	877	330	5,61
Kabupaten Wonosobo	2020	17,36	5,37	225	889	332	-1,66
Kota Magelang	2010	10,51	13,28	60	260	15	6,12
Kota Magelang	2011	11,06	11,51	64	293	24	6,11
Kota Magelang	2012	10,31	8,99	91	348	21	5,37
Kota Magelang	2013	9,8	6,75	108	386	21	6,04

Kota Magelang	2014	9,14	7,38	165	417	22	4,98
Kota Magelang	2015	9,05	6,43	187	418	26	5,11
Kota Magelang	2016	8,79	6,555	220	448	89	5,23
Kota Magelang	2017	8,75	6,68	234	440	86	5,42
Kota Magelang	2018	7,87	4,78	250	440	106	5,46
Kota Magelang	2019	7,46	4,37	274	455	100	5,44
Kota Magelang	2020	7,58	8,59	255	460	79	-2,45
Kota Pekalongan	2010	9,36	7	33	267	21	5,51
Kota Pekalongan	2011	10,04	8,06	63	294	25	5,49
Kota Pekalongan	2012	9,47	7,67	91	347	27	5,61
Kota Pekalongan	2013	8,26	5,28	114	384	35	5,91
Kota Pekalongan	2014	8,02	5,42	144	413	34	5,48
Kota Pekalongan	2015	8,09	4,1	152	421	45	5
Kota Pekalongan	2016	7,92	4,575	179	457	109	5,36
Kota Pekalongan	2017	7,47	5,05	192	449	109	5,32
Kota Pekalongan	2018	6,75	6,08	179	449	111	5,69
Kota Pekalongan	2019	6,6	5,8	213	476	115	5,5
Kota Pekalongan	2020	7,17	7,02	218	480	127	-1,87
Kota Salatiga	2010	8,28	10,22	52	238	21	5,01
Kota Salatiga	2011	7,8	9,02	61	263	24	6,58
Kota Salatiga	2012	7,11	6,84	78	326	28	5,53
Kota Salatiga	2013	6,4	6,21	106	358	17	6,3
Kota Salatiga	2014	5,93	4,46	166	399	24	5,57
Kota Salatiga	2015	5,8	6,43	167	400	34	5,17
Kota Salatiga	2016	5,24	5,195	240	456	84	5,27
Kota Salatiga	2017	5,07	3,96	218	448	120	5,58
Kota Salatiga	2018	4,84	4,23	209	448	89	5,84
Kota Salatiga	2019	4,76	4,33	236	470	81	5,9
Kota Salatiga	2020	4,94	7,44	228	476	87	-1,68
Kota Semarang	2010	5,12	8,98	328	640	30	5,87

Kota Semarang	2011	5,68	7,65	522	716	48	6,58
Kota Semarang	2012	5,13	6,01	781	937	72	5,97
Kota Semarang	2013	5,25	6,02	926	1.054	15	6,25
Kota Semarang	2014	5,04	7,76	1.138	1.105	29	6,31
Kota Semarang	2015	4,97	5,77	1.107	1.127	52	5,82
Kota Semarang	2016	4,85	6,19	1.492	1.212	247	5,89
Kota Semarang	2017	4,62	6,61	1.792	1.190	273	6,7
Kota Semarang	2018	4,14	5,21	1.821	1.190	330	6,48
Kota Semarang	2019	3,98	4,5	2.066	1.317	307	6,81
Kota Semarang	2020	4,34	9,57	2.517	1.299	375	-1,61
Kota Surakarta	2010	13,96	8,73	211	499	29	5,94
Kota Surakarta	2011	12,9	7,7	181	474	35	6,42
Kota Surakarta	2012	12	6,29	232	595	29	5,58
Kota Surakarta	2013	11,74	7,22	298	660	33	6,25
Kota Surakarta	2014	10,95	6,16	336	711	44	5,28
Kota Surakarta	2015	10,89	4,53	373	713	4	5,44
Kota Surakarta	2016	10,88	4,5	426	842	197	5,35
Kota Surakarta	2017	10,65	4,47	528	827	171	5,7
Kota Surakarta	2018	9,08	4,35	525	827	217	5,75
Kota Surakarta	2019	8,7	4,16	546	879	199	5,78
Kota Surakarta	2020	9,03	7,92	303	800	175	-1,74
Kota Tegal	2010	10,62	14,22	101	245	25	4,61
Kota Tegal	2011	10,81	9,77	117	265	24	6,47
Kota Tegal	2012	10,04	8,75	157	335	31	4,21
Kota Tegal	2013	8,84	9,32	176	371	30	5,67
Kota Tegal	2014	8,54	9,2	242	391	23	5,04
Kota Tegal	2015	8,26	8,06	272	406	74	5,45
Kota Tegal	2016	8,2	8,125	287	491	166	5,49
Kota Tegal	2017	8,11	8,19	307	482	134	5,95
Kota Tegal	2018	7,81	7,81	275	482	95	5,87

Kota Tegal	2019	7,47	8,08	286	503	120	5,77
Kota Tegal	2020	7,8	8,4	333	513	153	-2,25

### Lampiran 2 Data Analisis Statistik Deskriptif

	KEMISKINAN	TPT	PAD	DAU	DAK	LAJU_PDRB
Mean	12.99579	5.499143	272.0092	865.0177	172.8965	4.727558
Median	12.62000	5.160000	239.3402	850.3772	93.89240	5.390000
Maximum	24.58000	14.22000	2516.647	10218.71	1081.574	23.54000
Minimum	3.980000	1.500000	32.71058	238.0690	3.750100	-10.36000
Std. Dev.	4.486530	2.015998	251.5243	550.0716	142.3699	2.480149
Skewness	0.347421	0.897873	4.692847	12.78384	1.199545	-1.036863
Kurtosis	2.534007	4.236771	33.68304	218.4455	5.897790	16.72245
Jarque-Bera	11.22846	76.26706	16515.54	755088.7	227.0348	3089.720
Probability	0.003646	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	5003.380	2117.170	104723.5	333031.8	66565.15	1820.110
Sum Sq. Dev.	7729.516	1560.671	24293558	1.16E+08	7783368.	2362.038
Observations	385	385	385	385	385	385

### Lampiran 3 Data Common Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/12/22 Time: 21:05  
Sample: 2010 2020  
Periods included: 11  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.86139	1.011929	11.72156	0.0000
TPT	0.108310	0.109137	0.992423	0.3216
PAD	-0.007786	0.000913	-8.525988	0.0000
DAU	0.001753	0.000401	4.365345	0.0000
DAK	0.002001	0.001777	1.126024	0.2609
LAJU_PDRB	0.168092	0.088981	1.889078	0.0596
R-squared	0.192865	Mean dependent var	12.99579	
Adjusted R-squared	0.182216	S.D. dependent var	4.486530	
S.E. of regression	4.057231	Akaike info criterion	5.654340	
Sum squared resid	6238.766	Schwarz criterion	5.715949	
Log likelihood	-1082.460	Hannan-Quinn criter.	5.678775	
F-statistic	18.11238	Durbin-Watson stat	0.199665	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Lampiran 4 Data Fixed Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/12/22 Time: 21:09  
 Sample: 2010 2020  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.63527	0.429718	31.73073	0.0000
TPT	0.189401	0.049024	3.863440	0.0001
PAD	-0.001915	0.000481	-3.979953	0.0001
DAU	-0.000342	0.000132	-2.589229	0.0100
DAK	-0.007301	0.000626	-11.66852	0.0000
LAJU_PDRB	0.084167	0.027652	3.043740	0.0025

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.937629	Mean dependent var	12.99579
Adjusted R-squared	0.930578	S.D. dependent var	4.486530
S.E. of regression	1.182114	Akaike info criterion	3.270580
Sum squared resid	482.1012	Schwarz criterion	3.681307
Log likelihood	-589.5866	Hannan-Quinn criter.	3.433476
F-statistic	132.9840	Durbin-Watson stat	1.057908
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Lampiran 5 Data Random Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 06/12/22 Time: 21:09  
 Sample: 2010 2020  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 385  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.65744	0.697253	19.58748	0.0000
TPT	0.183674	0.048591	3.780007	0.0002
PAD	-0.002142	0.000474	-4.514896	0.0000
DAU	-0.000305	0.000132	-2.316302	0.0211
DAK	-0.007068	0.000623	-11.34695	0.0000
LAJU_PDRB	0.084000	0.027610	3.042374	0.0025

#### Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	3.265528	0.8841
Idiosyncratic random	1.182114	0.1159

#### Weighted Statistics

R-squared	0.564849	Mean dependent var	1.410071
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.559108	S.D. dependent var	1.842538
S.E. of regression	1.223440	Sum squared resid	567.2892
F-statistic	98.39223	Durbin-Watson stat	0.877135
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

Unweighted Statistics

---



---

R-squared	0.006622	Mean dependent var	12.99579
Sum squared resid	7678.332	Durbin-Watson stat	0.064804

---



---

### Lampiran 6 Data Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: UJI\_FEM  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	121.163806	(34,345)	0.0000
Cross-section Chi-square	985.747699	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: KEMISKINAN  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/12/22 Time: 21:08  
Sample: 2010 2020  
Periods included: 11  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.86139	1.011929	11.72156	0.0000
TPT	0.108310	0.109137	0.992423	0.3216
PAD	-0.007786	0.000913	-8.525988	0.0000
DAU	0.001753	0.000401	4.365345	0.0000
DAK	0.002001	0.001777	1.126024	0.2609
LAJU_PDRB	0.168092	0.088981	1.889078	0.0596

R-squared	0.192865	Mean dependent var	12.99579
Adjusted R-squared	0.182216	S.D. dependent var	4.486530
S.E. of regression	4.057231	Akaike info criterion	5.654340
Sum squared resid	6238.766	Schwarz criterion	5.715949
Log likelihood	-1082.460	Hannan-Quinn criter.	5.678775
F-statistic	18.11238	Durbin-Watson stat	0.199665
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Lampiran 7 Data Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: UJI\_REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
--------------	-------------------	--------------	-------

Cross-section random	31.962051	5	0.0000
----------------------	-----------	---	--------

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TPT	0.189401	0.183674	0.000042	0.3784
PAD	-0.001915	-0.002142	0.000000	0.0045
DAU	-0.000342	-0.000305	0.000000	0.0000
DAK	-0.007301	-0.007068	0.000000	0.0001
LAJU_PDRB	0.084167	0.084000	0.000002	0.9132

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 06/12/22 Time: 21:10

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.63527	0.429718	31.73073	0.0000
TPT	0.189401	0.049024	3.863440	0.0001
PAD	-0.001915	0.000481	-3.979953	0.0001
DAU	-0.000342	0.000132	-2.589229	0.0100
DAK	-0.007301	0.000626	-11.66852	0.0000
LAJU_PDRB	0.084167	0.027652	3.043740	0.0025

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.937629	Mean dependent var	12.99579
Adjusted R-squared	0.930578	S.D. dependent var	4.486530
S.E. of regression	1.182114	Akaike info criterion	3.270580
Sum squared resid	482.1012	Schwarz criterion	3.681307
Log likelihood	-589.5866	Hannan-Quinn criter.	3.433476
F-statistic	132.9840	Durbin-Watson stat	1.057908
Prob(F-statistic)	0.000000		

#### Lampiran 8 Data Cross Effect

No	KABUPATEN_KOTA	Effect
1	Kabupaten Banjarnegara	4,8126
2	Kabupaten Banyumas	5,130333
3	Kabupaten Batang	-2,41222
4	Kabupaten Blora	0,581151
5	Kabupaten Boyolali	-0,38336
6	Kabupaten Brebes	6,619931



7	Kabupaten Cilacap	2,607929
8	Kabupaten Demak	1,644135
9	Kabupaten Grobogan	1,915408
10	Kabupaten Jepara	-4,27607
11	Kabupaten Karanganyar	-0,37464
12	Kabupaten Kebumen	8,167462
13	Kabupaten Kendal	-1,53955
14	Kabupaten Klaten	2,241706
15	Kabupaten Kudus	-5,237
16	Kabupaten Magelang	0,06718
17	Kabupaten Pati	-0,71507
18	Kabupaten Pekalongan	-0,24801
19	Kabupaten Pemalang	4,846085
20	Kabupaten Purbalingga	6,31064
21	Kabupaten Purworejo	1,460873
22	Kabupaten Rembang	5,813375
23	Kabupaten Semarang	-4,02946
24	Kabupaten Sragen	2,288161
25	Kabupaten Sukoharjo	-3,83755
26	Kabupaten Tegal	-3,3936
27	Kabupaten Temanggung	-1,40849
28	Kabupaten Wonogiri	0,655787
29	Kabupaten Wonosobo	7,538586
30	Kota Magelang	-5,52182
31	Kota Pekalongan	-6,14482
32	Kota Salatiga	-8,36254
33	Kota Semarang	-6,47277
34	Kota Surakarta	-2,52815
35	Kota Tegal	-5,81624

**Lampiran 9 Data Period Effect**

	DATEID	Effect
1	2010-01-01	2.502869
2	2011-01-01	2.677833
3	2012-01-01	1.330361
4	2013-01-01	0.843642
5	2014-01-01	-0.179054
6	2015-01-01	-0.201900

7	2016-01-01	-0.141197
8	2017-01-01	-0.480850
9	2018-01-01	-1.983798
10	2019-01-01	-2.494680
11	2020-01-01	-1.873226

